

ABSTRAK

Ghesa Khiastra. 2014. Penerapan Hukum Terhadap Anggota TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana Susila di Lingkungan TNI (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/L/2014).

Pembimbing : I. Dr. M. Ali Zaidan, S.H.,M.Hum.,
II. Dr. H. Mohammad Hatta, S.H, M.Kn

Kata kunci : Tindak Pidana Susila, Prajurit TNI.

Era globalisasi dan teknologi telah mengubah gaya hidup, trend serta cara pandang baru bagi pergaulan para remaja saat ini. Persetubuhan yang dilakukan seorang Anggota Kowad TNI AD dengan sesama anggota TNI AD yang keduanya adalah gadis dengan bujang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Obyek penelitian ini adalah apakah penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana susila berdasarkan putusan Hakim Mahkamah Agung nomor putusan 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 dalam lingkungan militer serta penjatuhan sanksinya sudah memadai serta bagaimana bila ditinjau dari PP no.39 tahun 2010 ? Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normative ini hasil penelitian dari segi Undang-undang berupa data dan diyakini belum dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dibahas, dan diolah, yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari hasil dan kepustakaan yang tujuannya mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. Hasil analisis yang didapat adalah bahwa penerapan pidana belum memadai karena belum ada hakim yang menjatuhkan pidana maksimal sesuai yang diatur dalam pasal 281 dan ditinjau berdasarkan PP no.39 tahun 2010, Komandan satuan berwenang menjatuhkan PDTH kepada terdakwa apabila perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma – norma keprajuritan dan tidak layak untuk dipertahankan dalam TNI AD. Kesimpulan dan saran yang di dapat dari hasil analisis adalah, bahwa seharusnya penerapan pidana susila harus dijatuhkan dengan pidana maksimal sesuai dengan pasal 281 KUHP dan bagi prajurit yang melanggar dikenakan PDTH karena perbuatan susila tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak susila dan dilakukan penyuluhan hukum secara berkala di satuan – satuan oleh Komandan maupun perwira hukum untuk mengurangi kasus susila yang dilakukan prajurit TNI AD.

ABSTRACT

Ghesa Khiastra. 2014 Application of the Law Against Army Members Engaging in Environmental Crime Susila TNI (Juridical Analysis Against Supreme Court Number: 10-K / BDG / PMT-II / AD / L / 2014).

Advisor : I Dr. M. Ali Zaidan, S.H., Hum. ,
II. Dr. H. Mohammad Hatta, SH, M.Kn

Keywords : *Crime Susila, Indonesian Armed Forces.*

The era of globalization and technology have changed the life style, trends and new perspectives for the association of the teenagers today. Intercourse is what an Army Kowad Member with fellow members of the Army who are both with the servant girl was not stipulated in the Penal Law (Penal Code). Object of this study is whether the application of the criminal law for moral decision based on the number of Judges of the Supreme Court ruling : 10-K / BDG / PMT-II / AD / I / 2014 in a military environment as well as the imposition of sanctions is sufficient and how when the review of Regulation no. 39 of 2010? While the methods used is this normative juridical research results in terms of the Act in the form of data and is believed to have not been able to provide solutions to the issues discussed, and processed, which is then combined with the results obtained from the interviews and the literature that aim to get answers issues that have been raised . The results of the analysis were that the application of the criminal is not sufficient because there is no judge who dropped the maximum criminal process outlined in article 281 and reviewed under Regulation no. 39 of 2010, the unit commander authorized to impose PDTH to the defendant if the defendant's actions do not fit the norm soldiering and not worthy to be retained in the Army. Conclusions and suggestions obtained from the results of the analysis is, that the application should be dropped moral crime with a maximum punishment in accordance with Article 281 of the Criminal Code and for the soldiers who violate decency imposed PDTH unworthy deeds done by a soldier of the army to provide a deterrent effect for perpetrator acts of moral and legal counseling is done on a regular basis in the unit commander or officer by law to reduce the moral case made Army soldier.